

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum pertama pada masa Orde Baru, dilaksanakan pada tahun 1971. Pada tahun itu diwarnai oleh berbagai perubahan dari pemilu sebelumnya (1955). Perubahan itu dapat dilihat, misalnya aturan baru yang mungkin menguntungkan pihak-pihak tertentu. Fokus kajian penelitian ini adalah Golongan Karya, sebagai salah satu kontestan yang dapat meraih suara terbanyak pada pemilu 1971 di Jawa Timur.

Dipilihnya tema ini karena ada beberapa hal menarik yang perlu dikaji. Terjadinya konflik politik dan sosial diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat utamanya partai politik peserta pemilu, misalnya Jusuf Hasjim (Sekjen partai Nahdhatul Ulama) mengatakan adanya paksaan-paksaan para perangkat setempat kepada anggota partainya untuk ikut pohon beringin.<sup>1</sup>

Salah satu hal yang spesifik pada pemilu 1971 yakni penyederhanaan partai untuk yang pertama-kali dari jumlah tiga puluh empat partai menjadi sembilan partai ditambah golongan karya. Golkar sebagai golongan yang baru pertama-kali ikut, dapat memenangkan Pemilu dengan suara mutlak (62,79%) dan lebih dari 50% di propinsi Jawa Timur. Kemunculan Golkar mempengaruhi perolehan suara partai-

---

<sup>1</sup> Nahdhatul Ulama dari Kwintang Sampai Djombang, dalam *Tempo*, No.7, tanggal 17-April, tahun 1971, hlm. 5-6.

partai lain yang menurun, karena bersaing dengan Golkar; yang didukung oleh pemerintahan Orde Baru.

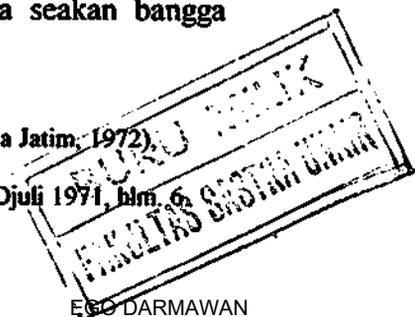
Pemilu di Indonesia diamanatkan oleh Tap MPRS No XI/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966.<sup>2</sup> Pasal 1, "Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juli 1968." Pasal 2, "Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-undang susunan MPR, DPR dan DPRD sudah harus selesai diundangkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dari tanggal penetapan ketetapan ini. Pembuatan kedua undang-undang yang diamanatkan MPRS itu sampai waktunya belum terwujud, sehingga Sidang Umum MPRS 27 Maret 1968 menerbitkan Tap MPRS No XLII/MPRS/1968 yang mengubah Tap MPR No XI/MPRS/1966. Perubahan itu berbunyi, "Pemilihan Umum yang bersifat langsung, umum, bebas, dan rahasia diselenggarakan dengan pungutan suara selambat-lambatnya pada 5 Juli 1971.

Rakyat Indonesia merasakan adanya suasana yang baru setelah rentang waktu enam belas tahun sejak Pemilu 1955. Rakyat Indonesia pada waktu itu mungkin mengharapkan perubahan dan perbaikan dalam pemerintahan yang baru. Hal tersebut dapat dilihat dari:

"Banyak para pemilih yang memakai baju baru bahkan di beberapa kantor departemen malah ada yang memakai pakaian lengkap seperti mau ke pesta. Pada pemilu 1971 banyak TPS yang dipasang di halaman rumah di bawah pohon rindang dengan suasana yang ramai sekali seperti mau kenduri. Mereka seakan bangga mengikuti kegiatan upacara yang besar dan merata."<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Anonim, Pemilihan Umum 1971 di Djawa Timur jilid I (Surabaya: Pemda Jatim, 1972), hlm.21.

<sup>3</sup> Dan Golkar-pun Meninggalkan Partai-partai, dalam *Tempo*, tanggal 10 Djuli 1971, hlm. 6.



Golkar yang secara resmi didirikan tahun 1964 dengan nama Sekber Golkar, pada pengalaman pertamanya mengikuti pemilu 1971 dapat memperoleh jumlah suara mayoritas. Kekuatan-kekuatan politik bagaimana yang mendukung Golkar sehingga menciptakan suatu strategi dalam persiapannya dalam menyambut pemilu 1971. Karena dianggap Golkar adalah partai yang identik dengan pemerintah dan ABRI.<sup>4</sup> Maka dalam strategi yang digunakan termasuk peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan dukungan-dukungan yang diberikan oleh ABRI.

Pada tahun 1971 pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto memajukan sektor ekonomi agar tercipta kestabilan politik, dari tinjauan Arbi Sanit<sup>5</sup> stabilitas politik ditentukan oleh variabel yang berkaitan satu dengan lainnya, yakni perkembangan ekonomi yang memadai, perkembangan kelembagaan baik struktur politik, dan partisipasi politik. Perkembangan ekonomi yang tidak diikuti oleh perluasan partisipasi politik, akan sulit untuk menciptakan terpeliharanya kestabilan politik. Sebab masyarakat yang merasakan perbaikan ekonomi, mulai memberikan perhatian kepada haknya yang lain di luar ekonomi itu sendiri. Sehingga ketika pemerintahan Soeharto mencanangkan pembangunan ekonomi, tanpa sadar pemerintahan ini telah mengabaikan adanya tuntutan masyarakat dalam partisipasinya dalam bidang politik.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Djiteng Soetojo, tanggal 26 Desember 2002

<sup>5</sup> Arbi Sanit, *op. cit.*, hlm. 1-4.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian, yakni:

1. Bagaimanakah sejarah terbentuknya Golongan Karya?
2. Bagaimanakah peran Golongan Karya pada pemilu 1971?
3. Bagaimanakah perolehan suara Golongan Karya pada pemilu 1971 di Jawa Timur?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi sosial-politik yang melatarbelakangi terbentuknya Sekber Golkar atau kemudian dikenal sebagai Golkar. Mengetahui proses-proses politik hingga Golkar menjadi suatu kekuatan politik dan kontestan pemilu 1971. Sejarah terbentuknya Sekber Golkar yang kemudian menjadi Golkar mencoba merekonstruksi sejarah Golongan Karya, terbentuk sejak permulaan hingga kemudian menggabungkan diri dalam kino-kino, yang akhirnya memutuskan sebagai konstestan Pemilu 1971 dan seterusnya.

Pengetahuan peran Golkar pada pemilu 1971, bagaimana organisasi politik ini mempersiapkan diri untuk dapat mendulang suara pada pemilu 1971. Cara-cara yang dilakukan oleh Golkar pada pengalamannya mengikuti pemilu 1971, sehingga akhirnya dapat mencapai perolehan suara lebih dari lima puluh persen.

Daerah Jawa Timur pada pemilu 1971 merupakan jumlah penduduk terpadat di seluruh wilayah Indonesia, mengetahui perolehan suara Golkar di daerah-daerah di

Jawa Timur serta beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Golkar pada kampanye pada pemilu 1971

Tulisan ini berguna untuk mengetahui kekuatan-kekuatan politik yang ada di Indonesia pada masa-masa pergantian kekuasaan pada dekade 1960-1970. Jika diperhatikan kekuatan-kekuatan politik di Indonesia terletak pada beberapa komponen, seperti: ABRI, partai politik, dan Golkar, sangat menarik untuk melihat bagaimana kekuatan-kekuatan itu berinteraksi satu dengan lainnya.

Meskipun tulisan mengenai Golkar banyak dibuat oleh para peneliti sebelumnya, namun khusus pada awal-awal kelahiran Golkar sebagai kekuatan politik, tidak banyak dikupas. Apalagi bila diingat pembahasan mengenai strategi yang digunakan dalam memenangkan Golkar. Kemudian mengingat pembahasan sejarah politik selalu ditulis tahun-demi tahun dalam berbagai pandangan, versi dan pendekatan yang berbeda pula, maka cukup adil kiranya penulis sebagai sejawatan menuliskan dan mempelajari perkembangan politik yang dapat dijadikan acuan pengetahuan tentang sejarah kondisi perpolitikan di Indonesia masa awal orde baru. Tulisan ini dapat dijadikan penyeimbang dari tulisan-tulisan sejarah yang lain.

#### D. Tinjauan pustaka dan Sumber

Beberapa pustaka yang digunakan sebagai rujukan adalah sebagai berikut: Pustaka pertama tulisan dari Herbert Feith, *The Indonesian Elections Of 1955*.<sup>6</sup> Menurut buku ini, penyelenggaraan pemilu itu sesungguhnya merupakan bentuk kompromi politik Sukarno terhadap berbagai tekanan yang muncul dari TNI soal otoritas pemerintahan, krisis kabinet yang bertubi-tubi, pemerintahan yang korup dan nepotis, percekocokan antar-partai serta tidak mampunya pemerintahan dalam menghadapi urusan-urusan ekonomi.

Pada bagian akhir bukunya itu, Feith kembali menegaskan bahwa Pemilu yang dilangsungkan pada 29 September 1955 itu dilakukan semata-mata untuk mengakhiri krisis kabinet yang menunjukkan kegagalan pemerintahan, melalui pemilu 1955 diharapkan dapat menciptakan parlemen yang representatif. Tapi sayangnya, Pemilu pertama ini gagal mendistribusikan kekuatan parlemen sesuai dengan realitas hubungan kekuasaan efektif di Indonesia.

Sementara itu Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*.<sup>7</sup> Buku ini sangat berguna sebagai pengantar untuk mengetahui peta-peta kekuatan politik di negara Indonesia, membahas sedikit peta politik Indonesia yang dipengaruhi sejarahnya dari zaman kuno sampai kerajaan. Kemudian titik sentralnya ada pada kekuatan-kekuatan politik diantara tahun 1960-1986. Di dalam buku ini dinyatakan bahwa stabilitas politik

---

<sup>6</sup> Herbert Feith, *The Indonesia Election Of 1955*, (New York: South Asia Progam, Cornell University Ithaca).

<sup>7</sup> Arbi Sanit, *Sistem Politik Indonesia*, "Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan", (Jakarta: PT. RajaGrasindo, tahun 2002).

digunakan sebagai metode atau kerangka untuk memahami sebagian dari keseluruhan proses politik di Indonesia. Atas dasar itu, dicoba memaklumi peranan kekuatan-kekuatan politik, sebagai struktur politik yang mengemban fungsi dukungan bagi rezim, dan menyampaikan tuntutan masyarakat kepada rezim. Keberhasilan dari kekuatan-kekuatan politik untuk dapat menjalankan fungsi dan peranannya, tidak saja diukur dari apa yang dicapai namun dipandang melalui akibat dari proses interaksi antar partai politik serta kestabilan politiknya

Hal ini juga dilambangkan dengan jatuh-bangunnya kabinet yang memerintah pada dasawarsa itu, bagaimana kestabilan politik yang diterapkan oleh Indonesia pada masa-masa awal Orde Baru membuat pro dan kontra bagi ahli-ahli politik. Di dalam buku ini kekuatan-kekuatan politik secara fisik dibedakan atas: ABRI, Partai Politik, Golongan Karya. Di dalam kehidupan politik kelompok-kelompok itu tidak terkotak dengan jelas. Buku ini juga melihat bagaimana peranan partai-partai politik yang ada pada masa itu adalah primodial.<sup>8</sup>

Harold Crouch,<sup>9</sup> *The Army, the Party, and Election*, membahas tentang hubungannya antara militer dengan dwi fungsinya, kemudian hubungannya dengan partai-partai politik di masa itu (awal Orde Baru). Tarik-ulur antara berbagai kepentingan membuat suatu rancangan undang-undang tentang pemilihan umum, memerlukan waktu yang lama untuk dapat disepakati. Ditunjukkan bagaimana peran TNI (khususnya AD), telah ikut ambil bagian dalam perpolitikan nasional

---

<sup>8</sup> Ikatan primodial; seperti: agama, suku, dan kedaerahan.

<sup>9</sup> Harold Crouch, *The Army, the Party and the Election*, dalam *Indonesian Journal*, 1971

Ken Ward 1971 dalam *Election in Indonesian*,<sup>10</sup> merupakan tulisan yang dibuat Ken Ward selama periode pemilu, ia pernah tinggal di Indonesia selama masa-masa pemilu berlangsung. Buku itu dituliskan pada tahun 1973, setelah ia kembali ke Australia. Buku ini merupakan sumber yang penting, karena ditulis hanya berselang 2 (dua) tahun sejak masa pemilu 1971. Banyak data-data tentang Pemilu 1971 khususnya tentang Jawa Timur yang disajikan secara lengkap dalam tiap kabupaten.

Majalah *Tempo* edisi Januari-Desember (berurutan tahun 1971), yang berisi berita-berita tentang pemilu di masa awal orde baru, yaitu pemilu dengan keikutsertaan Golkar. Majalah ini banyak sekali menyetengahkan berita politik tentang para eksekutif pemerintahan setingkat menteri serta para pimpinan TNI yang dalam pidatonya mendukung Golkar. Golkar nantinya akan menjadi partai yang sangat kuat dalam pemerintahan; sehingga dkuatirkan tidak mempunyai partai oposisi sebagai kontrol dalam pemerintahan. Berita di dalam majalah ini sedikit banyak menyetengahkan tentang proses jalannya pemilu

Andreas Pandiangan, *Mengugat Kemandirian Partai Golkar*,<sup>11</sup> Buku ini mencoba menghubungkan Golkar sebagai keluarga besar. Beranjak dengan asumsi kerancuan hubungan antara urusan pribadi dan urusan tugas atau jabatan dalam hubungan organisasi sosial di Indonesia. Pola hubungan antara yang memimpin dan

---

<sup>10</sup> Ken Ward, *The Election of Indonesian 1971*, (Australia: Monash Papers on Southeast Asia-No. 2, 1974).

<sup>11</sup> Andreas Pandiangan, *Mengugat Kemandirian Partai Golkar*, (Yogyakarta: BiGraf Publishing, 1996).

yang dipimpin tidak dapat dibedakan antara urusan pribadi dan urusan tugas atau jabatan.

Kemudian karangan ini lebih memfokuskan pada hubungan antar-anggota Golkar, karena bentuknya yang keluarga besar, dapat dikatakan sebagai bentuk yang unik dan tak ada bandingnya dalam khasanah ilmu politik. Hal ini lahir karena untuk mengimbangi PKI, dan onderbouw-nya, terutama setelah peristiwa gestapu. Sampai di awal Orde Baru golongan ini memainkan politik yang besar, yang oleh buku ini diibaratkan sebagai ibu (ABRI), dan anak sulungnya (Golkar). Hubungan tersebut menjadi menarik karena hubungan di atas rumah tangga bangsa, yang didalamnya tinggal anak-anak bangsa yang lain.

Selanjutnya karangan ini berisi tentang banyak sekali data tentang Golkar, mulai tentang orang-orang yang duduk di tubuh Golkar mulai dari ketua sampai anggota-anggotanya, kemudian seksi-seksi yang terdapat di Golkar.

## E. Kerangka Konseptual dan Metode Penelitian

### 1. Definisi Konsep

Dari beberapa kategori di atas, disertakan beberapa konsep mengenai hal terkait Mark N. Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai berikut:<sup>12</sup>

*“...Define a “political party” as an association formed to influence the content and conduct of public policy in favour of some set of ideological principles and/or interest either through direct exercise of power by participation in election”*

---

<sup>12</sup> Mark N. Hagopian dalam Andreas Pandiangan, *Ibid.*, hlm. 20.

(Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan politik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilu).

Dari definisi ini Golkar disebut sebagai partai politik karena organisasi ini dibentuk oleh kepentingan-kepentingan tertentu agar tercipta suatu kehidupan politik yang dicita-citakan Orde Baru dalam mengikuti pemilu 1971.

Golkar dikategorikan sebagai partai politik dengan sifat "*majority bent*" (kekuatan yang sangat mayoritas), mayoritas sangat mutlak yang hanya dimungkinkan bila suatu negara menganut sistem dua partai. Meskipun terdapat sepuluh kontestan pada pemilu tahun 1971, namun perolehan suara secara mayoritas diperoleh dari Golkar pada pemilu 1971.

Golkar diartikan juga sebagai "*office seeking organization*",<sup>13</sup> yaitu pendukung pemerintah orde baru yang mencari organisasi untuk proses legitimasi terhadap pemerintahan agar konstitusional.

Tujuan utama dari partai politik adalah memperoleh kekuasaan atau mengambil bagian dari kekuasaan, mereka berusaha memperoleh kursi dalam pemilihan umum, mengangkat wakil dan menteri, mengontrol pemerintahan.<sup>14</sup> Dari

---

<sup>13</sup> Karangan yang dimuat di Prisma 1981 oleh Daniel Dhakidae, terdapat pula pada Pilihan Artikel Prisma, "Analisa Kekuatan Politik di Indonesia" (Jakarta: LP3S), 1985, hlm.215.

<sup>14</sup> Maurice Duvenger, *Sosiologi Politik*, terjemahan Daniel Dhakidae, (Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1998), hlm. 267.

definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Golkar adalah partai politik yang memiliki tujuan untuk memperoleh kursi di DPR/MPR dan mengontrol pemerintahan

Dalam usaha untuk memperoleh suara mayoritas pada pemilu 1971 digunakan strategi, dalam kamus politik disebutkan: "Strategi sebagai kebijakan, cara bertindak, kebijaksanaan, atau diartikan sebagai cara atau kebijakan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>15</sup> Seterusnya Politik diartikan sebagai: rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.<sup>16</sup>

Dengan memperhatikan berbagai definisi dan pengertian di atas dapat disimpulkan *pertama*, bahwa Golkar sebagai kontestan pemilu 1971 dianggap sebagai partai politik. *Kedua*, dalam tujuannya untuk memperoleh suatu perjuangan politiknya, kelompok-kelompok pendukung Golkar strategi menggunakan berbagai cara dan rencana yang cermat, dalam mencapai serta tujuan serta tujuan politiknya memperoleh mayoritas pada pemilu 1971. Di propinsi Jawa Timur dapat disebutkan Golkar menggunakan berbagai kekuatan utamanya, yaitu: kekuatan birokrasi dan ABRI. *Ketiga*, Golkar oleh pemerintah rejim Orde Baru digunakan sebagai alat legitimasi politik dalam pemilu, maka partai ini digolongkan sebagai *office seeking organization*". Dengan memperhatikan perolehan suara Golkar pada pemilu 1971 sebesar 62,79% dan lebih dari 50% di propinsi Jawa Timur. Dapat dikatagorikan Golkar termasuk sebagai "*majority bent*".

---

<sup>15</sup> B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 444-445.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 509.

Masalah mulai timbul pada saat kapan Golkar disebut sebagai partai politik. Dengan berlandaskan di atas, Golkar mulai disebut partai politik ketika para 7-kino yang tergabung dalam Golkar mulai memutuskan untuk ikut pemilu 1971.

## 2. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah Ilmu sejarah kritis yang melalui beberapa tahap: Heuristik: Pencarian dan pengelompokan sumber. Sumber-sumber yang telah didapat dikelompok-kelompokkan menjadi suatu struktur yang jelas untuk dikaji lebih lanjut dalam langkah selanjutnya. Kritik Sumber: Kritik sumber dibagi menjadi dua macam, pertama kritik ekstern, yaitu penelusuran mengenai asli tidaknya bahan-bahan sumber tersebut. Apakah sumber tersebut ditulis oleh orang yang terpercaya, bukunya asli atau merupakan isu belaka. Pokoknya mengenai autentik tidaknya sumber tersebut. Yang kedua kritik intern, yaitu mengenai isi dari sumber tersebut. Apakah isi sumber tersebut benar-benar asli atau bohong belaka. Atau ada makna-makna yang tersembunyi di balik teks-teks-nya. Interpretasi (analisis): Tahap selanjutnya adalah menganalisis data-data yang telah didapat disertai dengan paduan dengan teori-teori dan konsep-konsep politik dan sejarawan yang lain. Selanjutnya digunakan dalam menginterpretasi data-data tersebut. Rekonstruksi: Hasil yang diperoleh setelah melalui beberapa tahap di atas ditulis dalam suatu penulisan yang

menarik dan jelas.<sup>17</sup> Dalam pengumpulan sumber selain digunakan sumber tertulis berupa (koran, majalah yang sejamin) serta tulisan dari internet juga pengumpulan sumber-sumber melalui wawancara terhadap tokoh Golkar di Jawa Timur atau orang-orang yang berhubungan dengan topik yang hidup dan berada pada lokasi penelitian pada masa-masa itu. Dengan metode ini diharapkan dapat mengetahui perkembangan Golkar secara obyektif.

Tempat penelitian mengambil skup Jawa Timur. *Pertama*, alasan emosional, yaitu tempat tinggal penulis di wilayah Surabaya Jawa Timur. *Kedua*, daerah Jawa Timur merupakan jumlah terbesar penduduk di seluruh wilayah di Indonesia pada waktu itu, *Ketiga*, daerah Jawa Timur dapat dikatakan basis Islam tradisional, namun perolehan suara Golkar di Jawa Timur, mencapai lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah suara. *Keempat*, pembatasan wilayah temporal dan spatial sangat penting dalam ilmu sejarah, untuk itu diambil spatial daerah Jawa Timur. Sedangkan lingkup temporal digunakan 1964-1971, yaitu dimana awal-mula berdirinya Golkar yang pada mulanya disebut Sekber Golkar sampai dengan keikutsertaan pada Pemilu 1971.

Pada pemilu 1971 daerah Tingkat I Jawa Timur dibagi atas: kotamadya Surabaya, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Blitar, Madiun, Modjokerto. Kabupaten di Jawa Timur terdiri dari: Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Pacitan,

---

<sup>17</sup> Lihat Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1991), hlm. 68.

Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Panarukan, Jember, Banyuwangi.

## F. Sistematika pembahasan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dan kritik serta menjadikan sebuah karya diterima secara ilmiah, diperlukan suatu urutan yang sistematis dalam suatu kesepakatan ilmiah, pembahasan atau penelitian berusaha untuk mengurutkan secara kronologis dan dijadikan bab terpisah, namun tetap memiliki keterkaitan yang erat.

**Bab I** berisi pendahuluan terdiri dari: latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan sumber, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**Bab II** berisi kondisi politik nasional menjelang kelahiran Sekber Golkar: terdiri dari pembentukan dewan nasional, konsep nasakom, implementasi nasakom di Jawa Timur, peran militer dalam politik, lahirnya sekretariat bersama golongan karya, Sekber Golkar di Jawa Timur.

**Bab III** berisi strategi politik Sekber Golkar di Jawa Timur pada pemilu 1971 terdiri dari: penundaan pemilu, kebijakan pemerintah pada pemilu 1971 terdiri atas: UU pemilu dan tata-cara pelaksanaan pemilu 1971, peraturan menteri no. 2/1969, peraturan pemerintah no. 6/70, kemudian dilanjutkan pembahasan tentang pembentukan badan khusus yang terdiri atas: komando pemulihan dan ketertiban, lembaga operasi khusus, pembentukan organisasi Islam, pembentukan badan

**pengendali pemilihan umum, peranan birokrasi pada kemengangan Sekber Golkar yang terdiri atas: bapaisme dan monoloyalitas, paeran militer di tubuh Sekber Golkar, organisasi onderbouw, kampanye Sekber Golkar, proses dan hasil pemilu 1971, Sekber Golkar/Golkar setelah pemilu 1971.**

**Bab IV. Berisi kesimpulan dari permasalahan yang dibahas.**

## **BAB II**

# **KONDISI POLITIK NASIONAL MENJELANG KELAHIRAN GOLKAR**